

DAFTAR ISI

		vii
		ix
		xiii
		1
		1
		2
		7
		8
		13
		14
		17
		20
		21
		25
		25
		25
		30
		35
		37
		41
		41
		42
		43
		51
		51
		55
		59

D.	Pajak Sebagai Kewajiban Kenegaraan	60
E.	Arti Pajak dalam Kehidupan Kenegaraan Indonesia	60
BAB 4	HUKUM PAJAK	63
A.	Hukum	63
B.	Pembagian Hukum	69
C.	Hukum Pajak	72
D.	Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Lainnya	75
E.	Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal	78
BAB 5	DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA	81
A.	Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang	81
B.	Syarat Pembuatan Undang-undang Pajak	82
C.	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Di Indonesia	86
D.	Perkembangan Undang-undang Perpajakan Indonesia	89
E.	Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Sebagai Dasar Hukum Pajak	100
BAB 6	PAJAK DAN MASYARAKAT	103
A.	Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak (<i>Tax Morality</i>)	103
B.	Respon Masyarakat Terhadap Pajak	106
C.	Perlawanan Terhadap Pajak	107
D.	Menghindarkan Diri Dari Pajak	108
E.	Mengelakkan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	110
F.	Melalaikan Pajak	111
G.	Keadilan Pajak (<i>Tax Equity</i>)	112
H.	Iklim Perpajakan	116
BAB 7	UTANG PAJAK	119
A.	Utang dalam Hukum Perdata	119
B.	Kewajiban Pajak	124
C.	Utang Pajak	127
D.	Timbulnya Utang Pajak	128
E.	Surat Ketetapan Pajak dan Timbulnya Utang Pajak	130
F.	Timbulnya Utang Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia	130
G.	Berakhirnya Utang Pajak	132
H.	Penagihan Utang Pajak	135
BAB 8	PENGGOLONGAN PAJAK	137
A.	Pembagian Pajak	137
B.	Penggolongan Pajak Ditinjau Dari Golongannya	138
C.	Penggolongan Pajak Ditinjau Dari Sifatnya	140
D.	Penggolongan Pajak Ditinjau Dari Lembaga Pemungutnya	141
E.	Penggolongan Pajak Ditinjau Dari Tarif Pajak yang Dikenakan	145
F.	Penggolongan Pajak Di Indonesia Sebelum Reformasi Perpajakan Tahun 1983	146
BAB 9	PAJAK YANG DIPUNGUT DI INDONESIA	149
A.	Pajak Pusat yang Dipungut Di Indonesia Sebelum Reformasi Perpajakan	149
B.	Pajak Daerah yang Dipungut Di Indonesia Sebelum Reformasi Perpajakan	154
C.	Pajak Pusat yang Dipungut Di Indonesia Saat Ini	158
D.	Pajak Daerah Provinsi yang Dipungut Di Indonesia Saat Ini	162
E.	Pajak Kabupaten/kota yang Dipungut Di Indonesia Saat Ini	164

F.	Pajak Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang Dipungut Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009	167
BAB 10	SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA	171
A.	Asas Pemungutan/pengenaan Pajak (<i>Beginsel</i>)	171
B.	Stelsel Pajak	173
C.	Penerapan Stelsel Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia	175
D.	Teknik dan Sistem Pemungutan Pajak	177
E.	Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia	178
BAB 11	FISKUS	189
A.	Institusi Pemerintah Sebagai Pengelola Pajak	189
B.	Fiskus Atau Aparat Pajak	191
C.	Fiskus pada Pajak Pusat	193
D.	Fiskus pada Pajak Daerah	200
E.	Kewenangan Fiskus pada Pajak Pusat	200
F.	Kewajiban Fiskus	207
G.	Rahasia Pajak	211
H.	Sanksi Atas Pelanggaran Kewenangan	213
BAB 12	WAJIB PAJAK, HAK PERPAJAKAN, DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK	215
A.	Wajib Pajak	215
B.	Hak Wajib Pajak, Kewajiban Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan	216
C.	Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak	216
D.	Hak Perpajakan Wajib Pajak	220
E.	Kewajiban dan Hak Perpajakan Wajib Pajak Daerah	227
F.	Sanksi Perpajakan	227
BAB 13	PENAFSIRAN HUKUM PAJAK	229
A.	Penafsiran dalam Hukum Pajak	229
B.	Penafsiran dalam Hukum	230
C.	Metode Penafsiran Hukum Pajak	233
DAFTAR PUSTAKA		243
TENTANG PENULIS		247
NJOPTKP	: Nilai jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak	
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia	
NOP	: Nomor Objek Pajak	-00000-
NPOP	: Nilai Perolehan Objek Pajak	
NPOPTKP	: Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak	
NTPKP	: Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	
NPPN	: Norma Penghitungan Penghasilan Neto	
NPWP	: Nomor pokok wajib pajak	
NPWPD	: Nomor pokok wajib pajak daerah	
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan	
PORD	: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
PP	: Pengaduan Pajak	
PPH	: Pajak Penghasilan	
PPJ	: Pajak Penerangan Jalan	
PPKB	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor	
PKAD	: Pajak Kendaraan di Atas Air	
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa	
PPH	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah	
PP	: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	